

PENGARUH PAN ISLAMISME TERHADAP KEHIDUPAN BANGSA MESIR TAHUN 1897-1922

Yesi Yuana Putri, Maskun, Syaiful M

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: yesiyuana@ymail.com

Hp. 085669965616

This study aims to find out the influence of Pan Islamism to the political of Egypt. The method is historical method. Data collection techniques are literature and documentation, while the data analysis is a qualitative data. From the research, the authors obtained that influence of Pan Islamism on political life in Egypt are three aspects of government power, nationalism, militancy and power. Pan Islamism managed to move struggle of people to sit in Egyptian government agencies. Pan Islamism expand cultivation of nationalism and unity encouraging Egyptians to fight against British policy. Pan Islamism successful form of mass forces against British policy in 1919-1922.

Penelitian ini bertujuan mencari pengaruh Pan Islamisme terhadap kehidupan politik Mesir. Metode dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik pengumpulan data adalah kepustakaan dan dokumentasi, teknik analisis datanya merupakan analisis data kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaruh Pan Islamisme terhadap kehidupan politik Mesir antara lain kekuasaan pemerintahan, nasionalisme dan kekuatan militansi. Pan Islamisme berhasil menggerakkan perjuangan rakyat duduk dalam lembaga pemerintahan Mesir. Pan Islamisme memperluas penanaman rasa nasionalisme dan memberikan semangat persatuan bangsa Mesir melawan kebijakan Inggris. Pan Islamisme juga berhasil membentuk kekuatan massa melawan kebijakan Inggris pada tahun 1919-1922.

Kata kunci: kehidupan mesir, pan islamisme, pengaruh

PENDAHULUAN

Islam memasuki masa kemunduran dan statis pada tahun 1250-1800 M, yang diakibatkan oleh berbagai fenomena sosial yang melanda ketentraman umat Islam, diantaranya perpecahan wilayah Timur Tengah yang menyebabkan persatuan Islam terpecah belah, perbedaan paham dan kepercayaan akan mazhab yang berbeda antar umat, serta ulah penguasa yang sewenang-wenang. Sebab-sebab inilah yang menyebabkan Islam jauh dari kemajuan, terlebih lagi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Didin Saefudin, sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis adalah perpecahan yang terdapat di kalangan umat

Islam, pemerintahan yang absolut, mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tak dapat dipercaya, mengabaikan masalah pertahanan militer, menyerahkan administrasi negara kepada orang-orang yang tidak kompeten dan intervensi asing. Lemahnya rasa persaudaraan Islam juga merupakan sebab terjadinya kemunduran Islam. Tali persaudaraan Islam yang terputus juga bukan hanya di kalangan awam saja, melainkan juga di kalangan alim ulama (Didin Saefudin, 2003 : 14).

Mesir merupakan salah satu wilayah strategis yang tidak luput dari pergolakan kemunduran dunia Islam. Mesir juga sebuah wilayah yang awalnya mengalami

keterpurukan yang cukup berarti. Keterpurukan Mesir dapat dilihat dari kurangnya pemahaman Mesir terhadap ilmu pengetahuan dan keadaan internal yang berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Sejak tahun 1517, Mesir dikuasai oleh kerajaan Turki Usmani. Kekuasaan Usmani di Mesir tidak hanya sebatas itu, di dalamnya bercokol kekuatan kaum *Mamluk* yang berada dalam naungan perlindungan kerajaan besar ini.

Sesuai dengan pernyataan Robert L. Tignor, In 1517, ottoman forces under the personal command of Sultan Selim redied themselves for a shouthern campaign. Wether the Sultan's forces intended to wage war against the Safavid foe in Iran or turn on the *Mamluk* regime in Egypt, which had made common cause with the Safavid, was uncertain. But when conditions favored a thrust against the Egyptians, Selim did not hesitate. The battles that ensued were fought with intensity abd savagey, though the outcome was never in doubt (Robert L. Tignor, 2010: 176).

Kekuatan Usmani yang semakin pudar menyebabkan kaum *Mamluk* berusaha menjadi penguasa Mesir seutuhnya. Terjadilah perebutan pengaruh di Mesir antara kaum *Mamluk* sendiri. Perebutan ini mengakibatkan semakin lemahnya kekuatan Usmani beserta kaum *Mamluk* di Mesir. Keadaan ini membuka pintu kesempatan bagi bangsa asing untuk menduduki Mesir. Bangsa asing itu ialah Perancis yang dipimpin oleh Napoleon. Napoleon berhasil menduduki wilayah Mesir dan menjadikannya wilayah yang berada di bawah pengaruh Perancis.

Ira M. Lapidius berpendapat, pada rentang abad delapan belas, disebabkan lemahnya kontrol Usmani persaingan antara beberapa faksi *Mamluk* mengakibatkan terbengkalainya irigasi, kemerosotan pajak, meningkatnya otonomi pastoralisme dan kesukuan. Melemahnya pengaruh Usmani menyebabkan perubahan besar dalam seluruh sistem kemasyarakatan Mesir. Pertama, kondisi tersebut membuka kesempatan bagi serangan Napoleon tahun 1798, membuka kesempatan bagi intervensi pihak Inggris dan berakhir dengan penunjukan Muhammad Ali sebagai gubernur Mesir pada tahun 1805 (Ira M. Lapidius, 1999 : 104).

Lepasnya Mesir dari pengaruh Perancis, menyebabkan masuknya pengaruh Inggris, sehingga urusan dalam negeri Mesir berada dalam kekuasaan Inggris. Inggris menggunakan Muhammad Ali sebagai alat pengontrol kekuasaan di Mesir. Meskipun ada sisi positif dari intervensi Inggris di Mesir, tetap saja pengaruh negatif yang ditimbulkan masih menyebabkan kekacauan dalam berbagai bidang kehidupan Mesir. Kekacauan tersebut menimbulkan munculnya pergolakan yang ditandai dengan berbagai perlawanan oleh rakyat Mesir yang menyadari keadaan negeri mereka yang semakin jauh dari kebebasan dan kemajuan, menyebabkan munculnya berbagai pergolakan dari para intelektual Islam di Mesir yang menuntut kebebasan dan kemandirian dalam menata kehidupan negeri mereka. Kesadaran para intelektual Mesir ini tidak serta merta muncul dengan sendirinya, akan tetapi seiring dengan kesadaran umat Islam dunia yang mulai menyadari kemunduran mereka.

Menurut Harun Nasution, jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali (Harun Nasution, 1975:14).

Kesadaran tersebut tertuang dalam sebuah pembaharuan Islam yang diwujudkan dalam sebuah paham tentang perlunya perbaikan dalam kehidupan yang dikenal dengan Pan Islamisme. Paham ini muncul di Mesir dan menjadi fondasi tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan Mesir. Pan Islamisme merupakan gagasan pembaharuan untuk memperbaiki kehidupan yang tertekan oleh kekuasaan ekstern maupun intern. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution berpendapat, melihat kenyataan demikian, Jamaludin menekankan perlunya dunia Islam bersatu padu melawan kekuatan asing dalam wadah Pan Islamisme. Jamaludin menilai bahwa sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas umat Islam. Barat tidak lebih kuat dari umat Islam bila saja mereka mau bersatu menghadapinya.

Persatuan dan kesatuan umat Islam sudah lemah sekali. Antara satu pemimpin negara Islam dengan yang lain terkadang saling menjatuhkan. Di antara umat Islam juga sering tidak memiliki komunikasi. Karena itu, umat Islam harus bersatu dalam Pan Islamisme (Muhammad Iqbal, 2010: 65).

Menurut Didin Saefudin, Pan Islamisme bukan berarti meleburnya kerajaam-kerajaan Islam menjadi satu, melainkan mereka harus mempunyai satu pandangan bersatu dalam kerja sama. Persatuan dan kerja sama merupakan sendi yang amat penting dalam Islam. Persatuan Islam hanya dapat dicapai bila mereka berada dalam kesatuan pandangan dan kembali kepada ajaran islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul (Didin Saefudin, 2003:16). Adanya Pan Islamisme menimbulkan efek terhadap kehidupan Mesir, karena dalam paham tersebut tertanam misi perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan khususnya dalam kurun waktu 1897-1922. Dalam bidang ilmu pengetahuan Pan Islamisme memberikan pemikiran bahwa umat Islam sangat memerlukan ilmu pengetahuan dan pendidikan berupa sekolah-sekolah di Mesir. Bidang sosial Pan Islamisme memberikan pemikiran untuk mengembangkan susunan masyarakat di Mesir. Bidang ekonomi Pan Islamisme memberikan pemikiran Mesir harus mengembangkan perindustrian dan memperbaiki sistem ekonomi. Bidang budaya Pan Islamisme memberikan pemikiran perlunya umat Islam di Mesir terbuka akan pengaruh positif dari luar. Bidang politik Pan Islamisme memberikan pemikiran tentang perubahan sistem pemerintahan yang dikuasai pihak asing dan menyatukan kekuatan rakyat Mesir dalam rasa nasionalis Mesir.

Munawir Syadzali dalam Didin Saefudin berpendapat, Pan Islamisme Afghani itu adalah sesuatu asosiasi antarnegara-negara Islam dan umat Islam di wilayah jajahan untuk menentang kezaliman intern, para penguasa muslim yang lalim, menentang kolonialisme dan imperialisme Barat, serta mewujudkan keadilan. Ide Afghani tentang Pan Islamisme merupakan daya tarik terbesarnya. Ia sangat antusias dalam mempersatukan seluruh kaum muslim di

bawah satu atap persaudaraan Islam (Munawir Syadzali dalam Didin Saefudin, 2003:17).

METODE PENELITIAN

Penelitian keilmuan sangat ditentukan keberhasilannya melalui keabsahan data dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode historis (penelitian sejarah). Menurut Nugroho Notosusanto, metode historis merupakan sekumpulan prinsip dan aturan sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya (Nugroho Notosusanto, 1984:10). Menurut Samsul Munir Amin, metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses penulisan sejarah (Samsul Munir Amin, 2009:4).

Pendapat di atas sesuai dengan Sumadi Suryabrata yang menyatakan bahwa tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.(Sumadi Suryabrata, 2000:73) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah suatu cara penelitian yang mengkaji sumber-sumber data mengenai masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis.

Pengertian variabel menurut S. Margono dalam bukunya Metodologi Penelitian Pendidikan adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih (S. Margono.1996 : 133). Menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini dalam bukunya Penelitian Terapan, variabel penelitian adalah himpunan beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah (Hadari Nawawi, 1993 : 92). Maka dari itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yang

memiliki fokus penelitian pada pengaruh Pan Islamisme terhadap kehidupan politik Mesir.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan misalnya koran, majalah-majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. (Koentjaningrat, 1983 : 81) Kepustakaan digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas (Tatang M. Amirin, 1986 : 73). Dengan teknik kepustakaan, peneliti berusaha mempelajari sumber buku tentang Pan Islamisme dan kehidupan Mesir untuk memperoleh data dan informasi berupa teori-teori atau argument-argument yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa pengaruh Pan Islamisme terhadap kehidupan Politik Mesir.

Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikuto.1989:188). Menurut S. Margono, teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (S. Margono, 1996 : 181). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data masa lampau dan data masa sekarang, sebab bahan-bahan dokumentasi mempunyai arti yang sangat penting dalam penelitian masyarakat yang memiliki orientasi kajian historis. Data-datanya berasal dari sumber-sumber informasi berupa buku-buku referensi dan foto-foto yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, yang dalam hal ini berupa Pengaruh Pan Islamisme terhadap Kehidupan Politik Mesir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan

bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1993:174). Menurut Muhammad Ali (1992:151) langkah-langkah analisi data kualitatif harus memenuhi :

1. Penyusunan data
Penyusunan data merupakan usaha peneliti dalam memilih data yang sesuai dengan yang akan diteliti dari data yang sudah diperoleh.
2. Klasifikasi data
Klasifikasi data merupakan usaha dari peneliti untuk menggolongkan data berdasarkan jenisnya.
3. Pengolahan data
Setelah data digolongkan berdasarkan jenisnya kemudian peneliti mengolah ke dalam suatu susunan kalimat secara sistematis dan kronologis sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti.
4. Penyimpulan
Setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka peneliti selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mesir merupakan negara republik di Afrika Utara dengan nama resmi *Jumhuriyah Misr al-Arabiyah*. Mesir beribukota di Kairo. Luas wilayah Mesir adalah 997.739 km². Wilayah Mesir berbatasan dengan Laut Tengah (Utara), jalur Gaza Israel, dan Laut Merah (Timur), Sudan (Selatan), dan Libya (Barat). Bahasa persatuan adalah bahasa Arab, sedangkan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Mesir adalah salah satu wilayah Islam yang pernah menjadi kekuasaan bangsa asing, seperti Turki Usmani bersama kaum *Mamluk*, Perancis dan Inggris. Pada tanggal 1 Juli 1798, Perancis bersama pasukan militernya berhasil mencapai Mesir dengan terlebih dahulu mendarat di Alexandria atau Iskandariyah salah satu pelabuhan penting di Mesir ini jatuh. Sembilan hari kemudian, Rasyid suatu kota yang terletak di sebelah timur Alexandria, jatuh pula. Pada tanggal 21 Juli tentara Napoleon sampai di daerah Piramid di dekat Cairo. Pertempuran terjadi di tempat itu dan kaum Mamluk karena tak sanggup melawan

senjata-senjata meriam Napoleon, lari ke Cairo. Tetapi di sini mereka tidak mendapat simpati dan sokongan dari rakyat Mesir. Akhirnya mereka terpaksa lari lagi ke daerah Mesir sebelah selatan. Pada tanggal 22 Juli, tidak sampai tiga minggu setelah mendarat di Alexandria, Napoleon telah dapat menguasai Mesir (Harun Nasution, 1975:29).

Usaha Napoleon untuk menguasai daerah-daerah lainnya di Timur tidak berhasil dan sementara itu perkembangan politik di Perancis menghendaki kehadirannya di Paris. Pada tanggal 18 Agustus 1799, Ia meninggalkan Mesir kembali ke tanah airnya. Ekspedisi yang dibawanya ia tinggalkan di bawah pimpinan Jenderal Kleber. Dalam pertempuran yang terjadi di tahun 1801 dengan armada Inggris, kekuatan Perancis di Mesir mengalami kekalahan. Ekspedisi yang dibawa Napoleon itu meninggalkan Mesir pada tanggal 31 Agustus 1801 (Harun Nasution, 1975:29-30).

Kepergian Napoleon dari Mesir menyebabkan kekosongan pemerintahan. Pendudukan Perancis tidaklah membuat Usmani diam dan takluk kepada mereka. Berbagai solusi coba mereka temukan untuk menandingi kekuatan Napoleon beserta pasukannya. Ketika dipandang diplomasi dengan Perancis tidak lagi dapat digunakan, maka Sultan Usmani mencoba mempertanggung angkatan militer agar dapat menandingi kekuatan mereka.

Untuk melawan tentara Napoleon yang telah menguasai seluruh Mesir serta pula telah menyerang Suria dan dari sini mungkin akan terus ke Istanbul, Sultan Salim III (1798-1807) mengumpulkan tentara. Salah satu perwira dari pasukan-pasukan yang disediakan itu adalah Muhammad Ali, seorang keturunan Turki yang lahir di Kawalla, Yunani pada tahun 1765” (Harun Nasution, 1975: 34).

Langkah pertama yang diambil oleh Muhammad Ali adalah mensterilkan Mesir dari *Mamluk* yang masih berkeliaran di sana. Tidak ada alasan baginya untuk memberikan ampun bagi kaum Mamluk. Tahun 1811 Mesir telah benar-benar steril dari Mamluk. Dengan demikian kekuasaan atas Mesir ada dalam genggamannya Muhammad Ali di bawah pemerintahan kerajaan Usmani.

Muhammad Ali melancarkan kebijakan asing secara gigih. Ia menundukkan gerakan kaum Wahabi dan memperkokoh kekuatan Mesir di Sudan dan mendukung kekuasaan Mesir atas Arabia Barat, dan Kota Suci Makah dan Madinah dan mendukung kekuasaan Usmani dalam peperangan kemerdekaan Yunani. Rezim militer yang kokoh ini didukung oleh reorganisasi pemerintah dan rakyat Mesir yang berskala luas. Dalam hal ini Muhammad Ali berusaha menciptakan sebuah kekuasaan diktator yang memusat yang dibangun di atas pasukan militer Turki, Kurdi, Circasia, dan beberapa pasukan militer lainnya yang telah menjadi anggota keluarga pribadinya. Dengan bantuan para penasihat militer dari Italia dan Perancis, Ia membentuk sebuah pasukan baru, yang semula direkrut dari tentara petani. Ia menyusun sistem perpajakan baru, dengan mempekerjakan petugas penarik pajak yang diberi gaji tetap, menggantikan pajak pertanian yang lama. Untuk dapat menggaji aparat pemerintah, dilancarkan reorganisasi perekonomian secara total (Ira M. Lapidus, 1999:102-103).

Hal-hal ini memberi gambaran tentang apa yang dikehendaki Muhammad Ali sebenarnya, pengetahuan tentang soal-soal pemerintahan, militer dan perekonomian, yaitu hal-hal yang akan memperkuat kedudukannya. Ia tak ingin orang-orang yang dikirimnya ke Eropa, menyelami lebih dari apa yang perlu baginya, dan oleh karena itu, mahasiswa-mahasiswa itu berada di bawah pengawasan yang ketat (Harun Nasution, 1975:37-38). Muhammad Ali hampir tidak lebih dari yang lain dari banyak penguasa Mesir asing, Mamluk dan Usmani, namun ia menarik penduduk Mesir ke dalam kegiatan negara dalam cara-cara yang tidak dimiliki sebelumnya oleh Mamluk dan Usmani. Dia merekrut orang-orang Mesir untuk masuk ke dalam militer, bahkan ada yang diberi jabatan perwira, ketika pasukan militer dari Albania dan Turki tidak cukup.

Kekuatannya Inggris berhasil menundukkan Mesir setelah kepergian Napoleon beserta pasukannya pada tahun 1882. Inggris memilih Evelyn Baring (diangkat ke gelar bangsawan sebagai *Earl of Cromer* tahun 1892 dan selanjutnya disebut

sebagai Cromer) sebagai Konsul Jenderal mereka di Mesir. "The British chose Evelyn Baring (elevated to the peerage as the earl of Cromer in 1892 and referred to hereafter as Cromer) as their consul general in Egypt. Cromer was a formidable figure" (Robert L. Tignor, 2010:) Pandangan bahwa Cromer ini akhirnya diterima oleh kelas penguasa Inggris di rumah dapat dilihat dari kenyataan bahwa Cromer menjabat sebagai konsul jenderal Inggris Mesir 1883-1907. Selama pemerintahan Inggris yang dimulai tahun 1882, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat Mesir, khususnya dalam bidang kehidupan politik Mesir yang antara lain terdiri dari aspek kekuasaan pemerintahan, nasionalisme dan kekuatan militansi.

Ketika administrasi Inggris yang dalam beberapa hal serasi dengan kepentingan masyarakat Mesir, tumbuh kebencian yang sangat mendalam terhadap kewenangan pemerintahan Inggris dalam menggunakan kekuatan, ketidakseimbangan dalam berbagai kebijakan perekonomian, pemecatan pejabat-pejabat Mesir yang digantikan dengan pejabat-pejabat Inggris. Pengabaian pendidikan, dan eksploitasi Mesir untuk memperluas imperium Inggris di Sudan. Di bawah pemerintahan Inggris ini elite tuan tanah dan elite intelektual Mesir melanjutkan perlawanan mereka (Ira M. Lapidus, 1999:108-109). Kebijakan pemerintahan Inggris dinilai tidak sesuai dengan hak-hak rakyat Mesir. Mereka mulai merasakan bahwa pemerintah Inggris semakin bertindak sewenang-wenang yang hanya bertujuan untuk kepentingan pihak Inggris semata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindakan Inggris dalam mencampuri urusan dalam negeri Mesir terutama dalam bidang politik menyebabkan munculnya rasa ketidaksenangan rakyat terhadap pihak Inggris.

Salah satu penyebab masuknya tokoh Mesir ke dalam pemerintahan yang dibentuk Inggris adalah peningkatan berbagai reaksi masyarakat terhadap pemerintahan Inggris. Reaksi masyarakat ini lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh terkemuka Mesir yang ahli dalam pemikiran pembaharuan negerinya. "Beberapa tokoh,

seperti Mustafa Kamil (1874-1953) meraih pendidikan sarjana hukum di Perancis, Luthfi al-Sayyid (1872-1963) berasal dari keluarga bangsawan kampung, yang menekuni studi Al-Quran dan hadist dan kemudian menekuni studi hukum, dan Saad Zaghlul (1860-1928), anak seorang kepala kampung yang semula menekuni studi agama dan belakangan memihak nasionalisme sekuler" (Ira M. Lapidus, 1999:112).

Maraknya respon masyarakat yang dituangkan dalam berbagai tuntutan, maka Konsul Jenderal Lord Cromer dalam masa akhir jabatannya di Mesir mengambil langkah tegas untuk mengatasi hal ini. Dari sekian banyak kaum intelektual Mesir, Cromer mencoba merekrut seorang tokoh yang cukup penting dalam kehidupan politik Mesir saat itu. Orang yang terpilih adalah Saad Zaghlul Pasha.

He brought the young moderate nationalist Saad Zaghlul (1857-1927) into the council of ministers as the minister of public instruction. The Egyptians hoped that the energetic and well-respected Zaghlul would give education on stronger voice in ministerial discussions. Although the Assembly was to have only advisory powers and the franchise was limited, Egyptians had reason to believe that these change were the beginning steps in creating a parliamentary system and power sharing with the British (Robert L. Tignor, 2010:238). Artinya bahwa Cromer memasukkan daftar nama Saad Zaghlul ke dalam dewan menteri yang menjabat sebagai menteri instruksi publik.

Masuknya Zaghlul Pasha ke dalam dewan elite pemerintah Mesir di bawah Inggris, maka menimbulkan banyak asumsi terhadap kenyataan ini. Salah satu anggapan yang muncul dari rakyat adalah sebuah harapan besar seorang ternama seperti Zaghlul Pasha dapat menyuarakan aspirasi rakyat Mesir dalam dewan menteri tersebut. Selain itu, Cromer juga menghidupkan kembali Majelis Nasional Mesir. Meskipun Majelis adalah hanya memiliki kekuatan penasehat dan waralaba terbatas, Mesir memilikialasan untuk percaya bahwa perubahan ini adalah langkah awal dalam menciptakan sistem parlementer dan pembagian kekuasaan dengan Inggris.

Inggris membuat sebuah pemerintahan yang dijabat oleh orang Mesir sendiri, tetapi wewenang dan kekuasaan ada dalam genggaman Mesir. Untuk merealisasikannya, Inggris menunjuk salah seorang pemimpin Mesir yang diberi jabatan *Khedive* dalam bahasa Mesir. Orang yang ditunjuk Inggris adalah Khedive Abbas II. Pada waktu perang pecah Khedive Abbas II mengunjungi Istanbul. Karena ketakutan Inggris terhadap kemungkinan Abbas menentang kekuasaan mereka, maka tanpa pikir panjang memecat dengan sewenang-wenang dan menggantinya dengan Husayn Kamil. "At the time war broke out Khedive Abbas II was visiting Istanbul. The British, fearing Abba's opposition to their rule, deposed him summarily and replaced him with Husayn Kamil. They also introduced military and a state of emergency" (Robert L. Tignor, 2010:239). Pembentukan pemerintahan yang dipimpin Khedive Abbas II ini tidak membuat Inggris tenang. Terbukti dengan tindakan Inggris yang segera menggantinya dengan Husayn Kamil karena Abbas II dianggap mengancam kedudukan Inggris. Bersamaan dengan pergantian Khedive tersebut, tidak terlupakan seorang tokoh nasional Saad Zaghlul. Zaghlul adalah seorang tokoh nasionalisme Mesir. Putra pribumi yang cukup terkenal, ia pernah belajar di al-Ahzar, di mana ia menjadi murid dari Muhammad Abduh dalam periode menjelang pendudukan Inggris.

Perang Dunia I semakin memusatkan keinginan pembebasan diri dari belenggu asing. Deklarasi tentang pemerintahan protektorat Inggris, hukum, keluarga, pengambilalihan tenaga buruh Mesir dan kapasitas industri, pesatnya migrasi ke Kairo dan merebaknya kesengsaraan hidup meningkatkan perlawanan bangsa Mesir terhadap pemerintahan Inggris. Zaghlul mampu memobilisir dukungan massa dan dalam rentang masa 3 tahun pertempuran dari tahun 1919 sampai 1922 memaksa pihak Inggris untuk mengakhiri protektoratnya. Pada tahun 1922 Mesir berubah sebagai negara semi independen di bawah bimbingan Inggris. Seorang raja Mesir dari sebuah dinasti yang didirikan Muhammad Ali dan sebuah parlemen, menjalankan urusan dalam

negeri Mesir. Sedang kebijakan luar negeri, urusan militer, urusan yang berkaitan dengan Sudan dan yurisdiksi atas segala orang asing berada dalam kewenangan Inggris tidak dalam kewenangan pemerintah Mesir (Ira M. Lapidus, 2010:114).

Thus, the 1919 revolution produced significant political changes, including a new constitution, a proclamation of Egypt's independence, and a newly elected government. It also resulted in a number of significant economic and social changes, in many ways far more radical than those that took place in the political sphere (Robert L. Tignor, 2010:244) Dengan demikian, revolusi 1919 menghasilkan penukaran politik yang signifikan, termasuk sebuah konstitusi baru, proklamasi kemerdekaan Mesir, dan pemerintah yang baru terpilih. Pergolakan rakyat yang turun dalam berbagai aksi massa tampaknya mampu menunjukkan pada Inggris bahwa rakyat sudah bergerak melawan pemerintahan mereka di Mesir, revolusi Mesir yang berkejolak pada tahun 1919 merupakan titik awal kehidupan yang baru. Sebuah permulaan yang sangat baik dalam menuju kehidupan Mesir untuk bebas merdeka dari pendudukan Inggris.

Rasa kebangsaan tampaknya mudah dikembangkan di Mesir, sebelum nasionalisme menjadi sebuah doktrin kesadaran diri, sejumlah penulis Mesir secara jelas telah mengidentifikasi Mesir sebagai *Watan*, tanah air. Homogenitas dan isolasi negeri ini, yang sepanjang sejarah pemerintahan pusatnya dan aspek kultural masa silamnya yang khas, melahirkan kesadaran akan identitas Mesir. Di Mesir, lebih nyata jika dibandingkan dengan negeri Timur Tengah lainnya, negara nasional modern didasarkan pada eksistensi warga Mesir dan sebuah negara Mesir (Ira M. Lapidus, 1999:113).

Dalam aspek nasionalisme berawal dari berbagai aturan yang ditetapkan Inggris dirasakan tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat Mesir, maka muncullah berbagai protes dari rakyat yang diprakarsai oleh kaum intelektual Mesir yang menyadari ketidakberuntungan negara dan wilayahnya di bawah kekuasaan bangsa lain. Pada akhir perang dunia negara mulai bergolak dengan

kebencian. Hal ini terbukti dari kurun waktu akhir abad 19, kurangnya semangat juang rakyat Mesir ditopang oleh munculnya tokoh intelektual yang mempunyai misi untuk menyatukan rakyat ke dalam sebuah persatuan atas nama bangsa Mesir.

Para penulis nasionalis, seperti Mustafa Kamil mengajukan gagasan tentang sebuah kesatuan bangsa, semangat patriotik, semangat kebenciannya terhadap pemerintahan asing, dan juga pembentukan sebuah pemerintahan konstitusional dan pendidikan model Barat. Luthfi al-Sayyid menjadi seorang filosof menekankan sebuah masyarakat sekuler dan konstitusioanal. Ia berdalih bahwasanya kebebasan merupakan basis (dasar) bagi masyarakat. Kebebasan dari penguasaan asing, kebebasan dari kontrol negara, dan pengakuan hak-hak sipil dan politik warga yang asasi merupakan prinsip utama bagi pembentukan masyarakat. Menurut Luthfi al-Sayyid nasionalisme berarti kemerdekaan dan sekaligus merupakan sistem politik dan sosial yang baru bagi Inggris (Ira M. Lapidus, 1999:113).

Diantara tuntutan nasionalis menjelang Perang Dunia I adalah dalam bidang perindustrian, ekonomi kurang dibebaskan dalam ekspor komoditas tunggal, tidak peduli seberapa tinggi harga dunia. Bank asli Mesir dijalankan oleh direktur Mesir dengan pemegang saham Mesir, yang akan melemahkan monopoli serta dinikmati oleh bank-bank asing yang banyak beroperasi di Mesir.

Misr Bank (Bank Mesir) didirikan dengan sistem pemilikan yang disengaja untuk membatasi warga Mesir dalam rangka bersaing dengan sejumlah perusahaan asing” (Ira M. Lapidus, 1999:117). Kemajuan ekonomi ini belum merata hasilnya di Mesir, karena hanya sebagian dari kalangan masyarakat kota saja yang dapat menikmati hasilnya .

Yet during this period what some called the woman question roiled Egyptian politics and thought. In the first place, the small minority that formed the educated and upper crust of Egyptian female society came out in large numbers to support Zaghlul during the 1919 disturbances. The most admired woman of the period, and in many

respects a pacesetter for new roles for Egyptian women, was the wife of Saad Zaghlul, Safiya Zaghlul, known to many as the mother of the Egyptian nation (Robert L. Tignor, 2010:249).

Sementara di tengah gejolak protes terhadap pemerintahan Mesir yang kacau, di sisi lain, minoritas kecil yang membentuk kerak berpendidikan dan kaum perempuan Mesir keluar dalam jumlah besar untuk mendukung Saad Zaghlul selama revolusi tahun 1919, yang paling dikagumi pada masa gejolak kaum wanita ini merupakan pembuka jalan untuk peran baru bagi perempuan Mesir.

Salah seorang diantaranya adalah istri Saad Zaghlul, Safiya Zaghlul, dikenal banyak orang sebagai ibu dari bangsa Mesir. Sebaliknya, Safiya Zaghlul berusaha menjadi pengaruh moderat, mengenai peran utama sebagai pendukung suaminya dan kemudian setelah kematiannya mampu melestarikan ingatan tentang perjuangan kebangsaannya.

Episode *Dinshawai* menyampaikan ide nasionalis dari milieu kelas-menengah mereka untuk kalangan mahasiswa dan juga masyarakat umum. Pada tahun 1906, sekelompok pegawai Inggris ketika sedang berburu terlibat perkelahian dengan warga setempat. Salah seorang dari mereka terbunuh dalam perkelahian tersebut dan sebagai balasannya pihak Inggris membunuh empat orang petani dan menghukum cambuk sejumlah lainnya di muka umum. Hal ini membangkitkan permusuhan warga Mesir terhadap pemerintahan Inggris (Ira M. Lapidus, 1999:14).

Berbagai peristiwa pergolakan terjadi di seluruh penjuru Mesir, diantaranya protes di provinsi Minya yang dilakukan oleh pejabat Mesir untuk membentuk Mesir yang independen dan berbentuk republik. Provinsi Minya dan provinsi lain pejabat setempat mengumumkan pembentukan independen, propinsi berbasis republik.

Firts in Minya Province, and then in other provinces, local officials announced the formation of independent, provincially based republics (Robert L. Tignor, 2010:242). Maka dari itu, terjadi sebuah revolusi yang diwarnai aksi massa terdiri dari seluruh rakyat Mesir dari berbagai kalangan yang dimulai tahun 1919 sampai dengan tahun 1922.

Seiring dengan pengaruh kuat dari otoritas Inggris atas Mesir, perkembangan pemikiran kaum intelektual pun semakin pesat. Semangat ini tentunya tidak main-main, terbukti dengan semangat Pan Islamisme yang mampu menjadi fondasi berfikir kaum intelektual Mesir agar perbaikan demi perbaikan mampu diwujudkan bagi Mesir. "Menurut Al-Afghani, reformasi Islam adalah penting lantaran ia merupakan basis moral bagi pencapaian teknik dan ilmiah bahkan bagi solidaritas politik dan kekuasaan" (Ira M. Lapidus, 1999: 9).

Jamaluddin menganjurkan Pan Islamisme perlu perbaikan dalam pemerintahan dengan membentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan rakyat, artinya kekuasaan raja harus dibatasi dengan undang-undang dan perlunya dibentuk dewan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Selain itu, kebebasan dan kemerdekaan itu harus dituntut dan diperjuangkan dengan sebuah revolusi melalui pemberontakan kalau perlu dengan pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di Mesir yang saat itu sedang berada dalam kekuasaan Inggris. Untuk membentuk kekuatan perlu diadakan perbaikan dalam pemerintahan Mesir. Menurut hemat saya, itu tidak berarti bahwa Sa'ad mengingkari prinsip, bahwa persatuan dunia Arab atau persatuan dunia Islam merupakan tujuan terakhir. ia hanya berpendapat bahwa sebelum terbentuknya persatuan seperti itu perlu diambil langkah-langkah pendahuluan, yaitu supaya masing-masing negeri Islam memperkuat dirinya sendiri terlebih dulu (Ahmad Amin, 1991:197).

Berdasarkan data di atas, maka peneliti melihat bahwa peristiwa yang terjadi di Mesir pada abad ke-19 adalah berupa pergolakan rakyat terhadap pendudukan asing. Pada abad itu, Mesir sedang berada dalam kendali Inggris. Jatuhnya Mesir dalam pendudukan Inggris, mengakibatkan Mesir sepenuhnya menjadi kekuasaan Inggris. Inggris memiliki wewenang untuk ikut campur dalam berbagai bidang kehidupan rakyat Mesir. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan perlawanan rakyat terhadap Inggris. Perlawanan rakyat ini diawali dengan

bangkitnya pemikiran kaum intelektual Mesir untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris. Pemikiran ini ada ketika gagasan Pan Islamisme muncul pada akhir abad ke sembilan belas. Sikap anti kolonial dan Pan Islam menjadi pendorong gerakan kemerdekaan dunia Islam. Maka dari itu, kebangkitan Mesir dari berbagai bidang khususnya dalam bidang politik disinyalir sebagai pengaruh dari munculnya gagasan Pan Islamisme.

Dalam aspek kekuasaan pemerintahan perubahan yang terjadi berawal dari munculnya tuntutan yang berwujud sebuah protes rakyat Mesir untuk mengkritisi kebijakan pemerintah Inggris di negeri mereka. Tuntutan ini diprakarsai oleh para intelektual Mesir yang terlebih dahulu menyadari akan bahaya penjajahan Inggris di Mesir. Tokoh intelektual Mesir yang paling banyak berperan dalam usaha melawan Inggris adalah Saad Zaghlul. Di antara murid-murid Jamaludin Al-Afghani ada yang kemudian menjadi pemimpin kemerdekaan Mesir yaitu Muhammad Abduh dan Saad Zaghlul sendiri. Mereka inilah yang membangkitkan semangat rakyat Mesir untuk mengusahakan jalan keluar dari penjajahan Inggris. Usaha mereka didasari oleh sebuah pemikiran untuk mendapatkan kebebasan Mesir dari penjajahan asing. Pemikiran dan pandangan mereka ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh Pan Islamisme yaitu Jamaludin Al-Afghani.

Pemikiran itu mengarah pada usaha untuk melepaskan diri dari Inggris dan membentuk pemerintahan sendiri. Ide tersebut muncul dalam diri Saad Zaghlul untuk melawan Inggris, yang dipengaruhi oleh pemikiran tokoh Pan Islamisme. Pengaruh inilah yang semakin mendorong semangat Saad Zaghlul untuk berusaha membebaskan Mesir dari penjajahan. Terlebih lagi pengaruh pemikiran seniornya mengacu kepada tujuan akhir yaitu Pan Islamisme yang mencita-citakan terciptanya persatuan umat Islam dengan keadaan negeri yang kokoh dan bebas dari penjajahan asing. Maka dari itu muncullah peristiwa pergolakan Mesir dalam menyatukan kekuatan untuk melawan Inggris. Diantara peristiwa yang terjadi salah satunya ialah dalam aspek kekuasaan pemerintahan

ini. Usaha yang dilakukan tokoh intelektual untuk memperbaiki kekuasaan pemerintahan terdorong oleh pemikiran dan pandangan seperti yang telah diutarakan di atas. Usaha mereka antara lain, mendudukkan diri dalam lembaga pemerintahan adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan mereka. Masuknya Saad Zaghlul dalam elite pemerintahan Mesir maka terbuka kesempatan untuk menjadi pemimpin yang dapat menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Inggris.

Dalam aspek nasionalisme Mesir munculnya peristiwa di atas pada dasarnya diprakarsai oleh tokoh intelektual Mesir yang lebih dulu memiliki pandangan akan pentingnya kesatuan Mesir untuk melawan Inggris. Penggerak dan motivator tokoh intelektual yang berjuang dalam nasionalisme Mesir adalah terwujudnya cita-cita Pan Islamisme yang digemakan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Dorongan ini berupa pemikiran yang semakin menyemangati mereka untuk melakukan berbagai usaha Mesir bebas dan terlepas dari penjajahan Inggris guna tercapainya cita-cita Pan Islamisme yaitu solidaritas umat Islam yang diwarnai oleh persatuan negeri Islam yang berdiri kokoh, bebas dari segala penjajahan asing. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya istilah *wathan* yang dicetuskan tokoh intelektual Mesir dan merupakan awal dari munculnya rasa persatuan Mesir. Dengan adanya istilah yang berarti tanah air ini, maka muncullah rasa kebangsaan Mesir. Semangat kebangsaan ini adalah berguna untuk membangkitkan mental juang rakyat sebagai pendukung perlawanan terhadap pihak Inggris. Adanya istilah tanah air ini diilhami oleh munculnya ide Pan Islamisme untuk menyatukan rakyat atas nama bangsa untuk melawan penjajahan Inggris. Ide Pan Islamisme ini mempengaruhi semangat rakyat untuk menyatukan diri dalam sebuah kekuatan yang berwujud kebangsaan Mesir.

Selain itu, dorongan semangat Pan Islamisme terlihat dari persatuan kaum petani dan wanita Mesir yang mengusung tema kebangsaan Mesir. Mereka berkumpul dan bersatu dalam sebuah kelompok yang memiliki identitas sama yaitu rakyat yang hidup di Mesir. Identitas yang lebih jelas terlihat dari persatuan wanita Mesir dalam

aksi massa yang menggunakan jilbab. Dalam aksi massa tersebut wanita Mesir menunjukkan pada dunia bahwa mereka adalah wanita Mesir yang beragamakan Islam dengan kewajiban menggunakan jilbab. Tujuannya adalah untuk menunjukkan identitas kebangsaan mereka pada Inggris. Dengan demikian, rakyat Mesir bergerak dan bersatu dalam wadah semangat kebangsaan yang ditujukan untuk Inggris bahwa mereka bersatu untuk menjadi bangsa yang bebas dan lepas dari kekuasaan asing. Persatuan kaum petani dan wanita tergabung dalam sebuah kelompok massa yang bergerak bersama dalam sebuah gerakan rakyat tahun 1919.

Pendukung bergeraknya semangat kesatuan tanah air dalam wujud nasionalisme adalah sebuah kekuatan dan semangat juang yang tiada hentinya. Semangat juang ini berwujud pada sebuah kekuatan militansi rakyat Mesir. Semangat juang tersebut berujung pada gerak nyata rakyat Mesir dalam sebuah aksi massa yang bergulir di seluruh penjuru Mesir. Gerakan ini dikenal dengan sebuah aksi yang terangkum dalam peristiwa revolusi 1919. Revolusi ini berhasil mengumpulkan massa selama tiga tahun yaitu dari tahun 1919 sampai 1922. Dalam revolusi tersebut seluruh rakyat Mesir berkumpul guna melawan Inggris menggunakan kekuatan fisik mereka. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya ide tentang pembaharuan kehidupan dalam segi pemerintahan.

Pembaharuan ini menekankan kepada pembentukan pemerintahan sendiri yang berdasarkan rakyat dan terlepas dari campur tangan pihak asing. Ide inilah yang mendorong semangat rakyat untuk berjuang mencapai tujuan mereka. Semangat rakyat ini berwujud dalam sebuah revolusi yang mampu memobilisir massa selama tiga tahun. Seluruh rakyat Mesir turun ke jalan guna bersama-sama menyatukan kekuatan untuk menunjukkan kepada Inggris bahwa mereka mampu menyatukan diri sebagai bangsa yang menuntut kebebasan. Perjuangan mereka inilah yang didorong oleh ide pembaharuan yang disebut dengan Pan Islamisme. Prestasi yang menonjol dari para pembaharu Islam seperti Afghani dalam gagasan Pan Islamismenya, telah merangsang bangsa-bangsa muslim untuk memberontak terhadap

dominasi Eropa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pan Islamisme telah menginspirasi rakyat untuk menyatukan kekuatan melawan penjajahan dalam sebuah gerakan massa. Maka dari itu, rakyat Mesir tergerak untuk melakukan aksi tanpa henti guna mencapai cita-cita kebebasan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh Pan Islamisme terhadap kehidupan politik Mesir tahun 1897 sampai 1922 terdapat dalam tiga aspek antara lain kekuasaan pemerintahan, nasionalisme, dan kekuatan militansi Mesir. Pengaruh Pan Islamisme terhadap kekuasaan pemerintahan adalah berhasil menggerakkan perjuangan rakyat untuk duduk dalam lembaga pemerintahan Mesir. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa kedudukan struktur pemerintahan ada orang Mesir yang ditunjuk sebagai menteri dalam lembaga pemerintahan yang disebut dewan menteri, diaktifkannya sebuah badan majelis nasional Mesir yang berfungsi sebagai badan penasehat, serta orang Mesir yang diberi jabatan *khedive* untuk menjadi pemimpin Mesir. Perubahan tersebut muncul karena adanya tuntutan rakyat yang dipelopori oleh kaum intelektual Mesir. Tokoh intelektual Mesir mendapat

semangat juang dari tokoh Pan Islamisme untuk melawan kebijakan pemerintahan Inggris di Mesir.

Pan Islamisme berhasil memperluas penanaman rasa nasionalisme Mesir dan menciptakan semangat persatuan bangsa Mesir untuk melawan kebijakan Inggris. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya istilah *wathan* yang berarti tanah air Mesir, kritikan tokoh intelektual melalui pers nasional, serta persatuan petani dan wanita Mesir pada tahun 1919. Peristiwa nasionalis ini ditujukan untuk menuntut kebijakan Inggris di Mesir yang dipengaruhi oleh semangat melawan penjajahan asing yang tertuang dalam gagasan Pan Islamisme.

Pan Islamisme berhasil membentuk kekuatan massa untuk melawan kebijakan Inggris yang selama ini belum pernah terjadi di Mesir. Hal ini ditunjukkan dengan berkobarnya aksi rakyat yang terwujud dalam sebuah protes di provinsi Minya dan berujung pada persatuan aksi massa turun ke jalan dalam gerakan revolusi yang terjadi selama tiga tahun antara tahun 1919 sampai tahun 1922. Peristiwa ini terjadi sebagai pendukung maraknya tuntutan rakyat Mesir terhadap kebijakan pemerintahan Inggris yang dipengaruhi oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan asing yang tertuang dalam Pan Islamisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Angkasa: Bandung
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah: Jakarta
- Amirin, Tatang M. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. PT Grafindo Persada: Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktis*. Bina aksara: Bandung.

- Iqbal, Muhammad & Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam*. Prenada Media Group: Jakarta
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Gramedia: Jakarta.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Margono, S. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Indayu Press: Jakarta.

Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Pergerakan)*. Bulan Bintang: Jakarta

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Intidayu Press: Jakarta.

Saefudin, Didin. 2003. *Pemikiran Modern dan Post Modern Islam*. Grasindo: Jakarta

Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Fajar Agung: Jakarta.

Sumadi, Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Suryabrata, Sumardi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tignor, Robert L. 2010. *Egypt A Short History*. Princeton University Press: Amerika Serikat.

Yatim, Badri. 1993. *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*. RajaGrafindo Persada: Jakarta